

PEMBANGUNAN POLITIK DAN KUALITAS DEMOKRASI

Aditiyawardman

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Email: Aditiyawardman68@gmail.com

ABSTRAK

Persoalan Pembangunan menjadi permasalahan politik bagi negara berkembang maupun negara maju. Negara berkembang dihadapkan pada persoalan perubahan. Perubahan apakah yang dibutuhkan oleh negara berkembang tersebut untuk meningkatkan kualitas demokrasinya ? dikenalkan dengan beberapa konsep pembangunan politik secara langsung, baik pembangunan yang bersifat struktur, fungsi dan tujuan yang bersifat politik sebagai perubahan yang mengarah pada suatu focus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pembangunan politik yang didefinisikan secara luas. Studi tentang pembangunan politik dalam konsep pembangunan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada "like and dislike". Dalam mendapatkan out put yang baik dibutuhkan konsep pembangunan politik yang memenuhi syarat agar mendapatkan hasil yang dapat mensejahterakan, memberikan kebebasan dan keadilan kepada masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pembangunan politik sesuai dengan konsep pembangunan politik maka kualitas demokrasi sudah dapat terpenuhi. Dapatkah konsep pembangunan politik meningkatkan kualitas ideal demokrasi ? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.

Kata Kunci : *Pembangunan Politik dan Politik Serta Kualitas Demokrasi*

PENDAHULUAN

Permasalahan Pembangunan di masyarakat, terutama di negara berkembang yang telah memiliki hak untuk mengatur negara yang sudah merdeka dan telah bersiap untuk membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan dalam bidang politik. menghadapi pelaksanaan pembangunan politik seringkali terjadi dalam praktik pelaksanaan pembangunan politik tidak dapat membedakan posisinya sebagai negara yang baru merdeka dan

harus mensejahterakan rakyat serta menjalankan tugas perubahan dalam menjaga kualitas demokrasi dengan kedudukannya sebagai negara yang baru merdeka untuk memberikan dan mendistribusikan kesejahteraan, kebebasan dan keadilan kepada masyarakatnya.

Pembangunan politik merupakan pengembangan dari Teori Politik yang menjadikan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang ada dalam satu wilayah

berkomitmen untuk menjadikan kehidupan masyarakat lebih teratur.

Perkembangan studi pembangunan politik tidak dapat dipisahkan dari subdisiplin Kualitas Demokrasi karena pembangunan politik dan Demokrasi sering dianggap sebagai satu kesatuan. Kualitas Demokrasi menghasilkan studi Pembangunan Politik sebaliknya Pembangunan politik adalah studi meningkatkan kualitas demokrasi.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Politik

Dalam studi pembangunan politik ada beberapa pemahaman, definisi dan pengertian yang saling terkait yaitu, perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992). Perubahan politik dapat diartikan sebagai terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila. Permasalahannya adalah apakah perubahan itu bersifat progresif yaitu untuk menuju situasi yang lebih baik dari yang sebelumnya ataukah bersifat regresif yakni menuju situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Contohnya adalah Indonesia masa pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter berubah ke masa reformasi yang cenderung lebih demokratis, dimana kedaulatan rakyat

lebih dijunjung tinggi. Disamping itu, menurut Hungtinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989). Konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, devertatif, teologis dan fungsional:

1. *Konsep Geografis* berarti terjadi proses perubahan politik pada Negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh Negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutment politik dan sebagainya. Secara geografis, negara yang ada di wilayah benua Eropa dijadikan sebagai dasar perubahan politik yang digunakan konsepnya oleh negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang.
2. *Konsep Derivative* dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. aspek ekonomi menjadi tujuan pokok dari konsep ini.
3. *Konsep Teologis* dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik,

demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Huntington dalam Ramlan Surbakti, 1992).

4. *Konsep Fungsional* diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik yang ideal dan ingin dikembangkan oleh suatu Negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional.

Perkembangan Pembangunan Politik

Sebagaimana definisi perencanaan, definisi pembangunan juga ada bermacam-macam. Menurut Bryant dan White dalam Suryono (2010), pembangunan berarti upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu maupun kelompok (capacity).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (equity).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan

dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment).

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (interdependence).

Bryant dan White menegaskan bahwa lima prinsip dasar di atas harus berorientasi pada pembangunan yang berpusat pada manusia yaitu bahwa proses pembangunan harus meningkatkan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya sendiri.

Katz (Suryono, 2010) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Apa yang dipandang lebih bernilai itu adalah sifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya yang satu ke budaya yang lain, atau dari negara yang satu ke negara yang lain. Rogers (Suryono, 2010). Menurutnya, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material, bagi

mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain).

Perkembangan Politik

Politik terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik (*consist of people acting politically*) yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengenyampingkan kepentingan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat ini mempunyai kepentingan yang diperjuangkan agar pemerintah terpengaruh. (Miftah Thoha, 2011). Cara pandang tentang perilaku kelompok-kelompok kepentingan ini mendapat pertentangan dari teori-teori keadilan dalam perspektif filsafat Barat kontemporer, mulai dari Utilitarianisme, Persamaan Liberal, Libertarianisme, Marxisme, Komunitarianisme hingga Kritik Feminisme. Salah satu contohnya adalah *Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Rawls. Dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice (terbit pertama kali tahun 1971)*, Rawls mengajukan dua prinsip keadilan yang dijabarkan dari sebuah prinsip keadilan umum. *Prinsip Pertama*, Tiap-tiap orang memiliki hak yang sama atas keseluruhan sistem

yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang. *Prinsip Kedua*, Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:

- a) Memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan.
- b) Membuka posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang fair.

Prinsip pertama tidak lain adalah prinsip kebebasan, yang sebenarnya merupakan standar hak-hak politik dan sipil yang dikenal luas dalam masyarakat demokrasi liberal, seperti hak untuk memilih, mencalonkan diri dalam jabatan, membela diri, kebebasan berbicara, berpindah dan sebagainya, sedangkan prinsip kedua dikenal sebagai prinsip perbedaan (*the difference principles*), sebuah prinsip yang dianggap kontroversial karena memberikan tekanan pada pengaturan distribusi ekonomi (Kymlicka dalam Wahyudi, 2004).

Terlepas dari kontroversi dan perdebatan seputar *difference principles* dari Rawls, dewasa ini, demokrasi merupakan sistem politik yang banyak diminati negara-negara di dunia, terutama negara-negara yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan pemerintahan yang totaliter. Minat ini dipengaruhi oleh keyakinan bahwa demokrasi dapat mengayomi berbagai aspirasi yang dimiliki dan disampaikan oleh rakyat; sehubungan dengan kesadaran akan kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat

sebagai hak asasi yang dimiliki setiap orang. Pada dasarnya konsep tentang demokrasi itu sama namun cara pandang dan penerapan demokrasi di setiap negara akan berbeda. Hal ini sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pandangan hidup dan dasar serta tujuan negara masing-masing.

Munir Fuadi dalam bukunya Konsep Negara Demokrasi (2010:2) mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Menurut Ling dan Shih (Hara,2000), ada Empat pendekatan dalam memahami demokrasi di Asia Tenggara. Keempat pendekatan itu adalah institusionalis, internasionalis, demokrasi gaya Asia, dan illiberal democracy. Dua pendekatan pertama sering disebut conversionism karena

kesamaan dasarnya yang melihat perlunya Asia Tenggara mengabsorpsi nilai-nilai dan kelembagaan demokrasi Barat agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Budaya politik haruslah budaya politik rasional yang berorientasi pada problem solving, bukan pada nilai-nilai komunal dan religius. Budaya rasional diperlukan untuk mendorong masyarakat madani yang aktif. Budaya ini terutama harus muncul di lembaga-lembaga politik seperti pemilu, parlemen, pengadilan, parpol dan media. Pendekatan ketiga mengklaim bahwa demokrasi liberal berangkat dari nilai-nilai Barat yang individualis dan impersonal yang tidak cocok dengan nilai-nilai Asia yang menekankan komunalisme, personalisme, penghormatan pada atasan dan perlunya campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat.(Neher dalam Hara,2000). Klaim terhadap demokrasi gaya Asia ini biasanya diperkuat dengan argumen bahwa Asia Tenggara memerlukan kestabilan dan pembangunan (Milner dalam Hara,2000). Demikian juga berkembang anggapan bahwa masyarakat belum siap berdemokrasi karena itu diperlukan pemerintahan yang aktif dalam membimbing masyarakat atau semacam *tutelary government* (Kausikan dalam Hara,2000). Juga biasa diungkapkan argumen tentang kedaulatan dan otonomi negara untuk mengatur dirinya sendiri sebagai cara untuk menolak demokrasi yang dikampanyekan oleh negara-negara Barat (Mohamad dalam

Hara,2000). Menurut Hara, pendekatan terakhir ini sebenarnya lebih dekat kepada persoalan demokratisasi yang dihadapi Asia Tenggara terutama dalam asumsi bahwa demokrasi di Asia Tenggara adalah produk yang bercampur antara nilai lokal dan nilai demokrasi liberal. Asia Tenggara meminjam institusi dan norma-norma politik-Barat, tetapi penerapannya berdasarkan kondisi lokal baik kondisi budaya, historis, sarana dan strategi. Hasilnya adalah sebuah negara yang mengatur banyak hal, teknokratis dan mengontrol diskursus politik di masyarakat.

Ginandjar Kartasmita pada orasi ilmiah dalam acara wisuda sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ahmad Dahlan Jakarta (2008), mengatakan bahwa dalam teori demokratisasi dikenal dua tahap, yaitu tahap transisi dan tahap konsolidasi. Transisi seperti dikatakan oleh O'Donnell dan Schmitter (1991) adalah masa antara dua rezim politik. Transisi demokrasi dimulai sejak bergulirnya proses desolusi (tumbangnya) sebuah rezim otoriter pada ujung yang satu dan ditegakkannya rezim demokrasi pada ujung yang lainnya. Pada tahapan ini penekanan ada pada penegakan demokrasi secara prosedural yakni berfungsinya berbagai institusi-institusi politik secara demokratis. Tahap konsolidasi menurut berbagai literatur merupakan konsep yang tidak kalah sulitnya dibanding proses transisi. Bahkan banyak negara yang jatuh kembali ke rezim otoriter karena gagal

menyelesaikan proses konsolidasi demokrasi. Menurut Linz dan Stepan (1996), konsolidasi demokrasi berarti bahwa demokrasi bukan hanya telah tegak sebagai sebuah sistem politik tetapi juga telah membudaya di kalangan masyarakat. Bahkan betapapun besarnya tantangan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat tidak akan berpaling dari demokrasi ke sistem politik lain. Tahap konsolidasi menghendaki perhatian pada segi-segi substantif, karena di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi melambangkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi politik yang represif dan penggantian pemimpin-pemimpin otoriter. Demokrasi merepresentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus menjamin terwujudnya esensi demokrasi: pemberdayaan rakyat (popular empowerment) dan pertanggungjawaban sistemik (systemic responsiveness).

Berbagai uraian tentang Pembangunan Politik di atas, bila ditelusuri lebih jauh sebenarnya berangkat dari pemikiran filsafat politik yang diletakkan oleh Plato. Filsafat politik Plato berupaya membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Pemikiran Plato tentang negara

idealnya dalam buku *Republic* merupakan suatu ideal, suatu idaman, suatu cita-cita yang merupakan jawaban atas pertanyaan ke mana negara hendak digiring dan bukannya untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengurus atau mengatur negara itu. Pertanyaan kedua tersebut justru baru ditemukan pada buku *Politicus* dan *The Laws*. Dengan demikian maka pertamanya Plato membangun suatu ideal, baru kemudian ia memberi petunjuk yang perlu untuk berjalan menuju ke ideal itu. (Rapar, 2002).

Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik.

Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik dan munculnya idealisme dari masyarakat industri yang berkaitan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik sama dengan modernisasi politik. Negara-negara industri maju merancang dan membuat model dan menjadi pelopor dari kehidupan sosial dan ekonomi, karena itu dapat dimengerti bila banyak orang yang mengharapkan bahwa hal seperti itu juga terjadi dalam dunia politik. Tetapi penerimaan yang terlalu mudah atas pandangan ini mengundang tantangan dari kelompok yang mempertahankan relativisme kebudayaan, yang memperlakukan keberadaan dari identifikasi ciri-ciri masyarakat industri yaitu negara Barat yang dijadikan sebagai standard kontemporer dan universal bagi setiap kehidupan politik.

Perkembangan sejarah dunia memang dapat ditelusuri pertumbuhan Kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma sosial yang semakin luas dan tersebar di dunia serta dirasakan sebagai sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu dan pemerintah. Banyak dari standard-standrd ini dapat ditelusuri kembali pada pembangkitan masyarakat industri dan pertumbuhan ilmu dan teknologi, tetapi sebagian besar, pada saat ini mempunyai dinamika sendiri. Partisipasi masa, misalnya, mencerminkan kenyataan sosial dari kehidupan masyarakat industri, tetapi juga telah dianggap sebagai hak mutlak dalam semangat pada zaman masa kini. Cita-cita lainnya seperti tuntutan hukum yang universal, penghargaan yang lebih didasarkan pada prestasi daripada berdasar kan kelahiran, dan konsep-konsep umum mengenai keadilan dan kewarga negaraan, sekarang nampaknya memperoleh kedudukan yang tinggi dalam setiap kebudayaan, sehingga cukup beralasan untuk disebut sebagai standard yang universal bagi kehidupan politik modern.

Konsep Pembangunan Politik saat ini tidak lagi bersifat sederhana, karena masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang pun semakin kompleks. Pembangunan Politik tidak lagi banyak mengendalikan pembangunan politik secara fisik. fungsi utama Pembangunan Politik adalah berkaitan dengan modernisasi ekonomi dimana perubahan ekonomi memberikan gambaran yang jelas

untuk membentuk lembaga-lembaga politik.

Dalam demokrasi borjuis pada abad ke Delapan Belas di negara-negara Inggris, Perancis, Jerman dan Amerika Serikat golongan borjuis mengambil alih kekuasaan dan pengawasan politik. Pemerintahan borjuis membantu industrialisasi dengan memberikan bantuan langsung dengan memberikan hak-hak istimewa aristokrat, kewajiban-kewajiban feodal, peraturan-peraturan dan hak-hak petani semua itu dihancurkan dasar hukumnya oleh pemerintahan baru.

Golongan Aristokrat pemilik tanah di Inggris bukanlah golongan Bourjuis yang bertanggungjawab atas pemutusan hubungan kerja antara petani dan tanah garapannya di Inggris. Dengan melakukan itu, golongan aristokrat dengan tidak sengaja memberikan dorongan kepada industrialisasi dan hilangnya monopoli kekuasaannya sendiri.

Negara yang berindustrialisasi di bawah pemerintah borjuis memiliki perbedaan dengan negara industri pada masa sekarang yaitu negara yang relatif maju dalam perkembangan ekonominya. Negara memiliki banyak modal dan taraf kehidupan masyarakat lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang belum berkembang pada saat ini. Sistem sosial praindustri dan etos kerja mereka masih ada, lebih sesuai dengan sistem ekonomi industri.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di gunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran pemecahan masalah berdasarkan analisis dan interpretasi penulis, berdasarkan literatur – literatur yang penulis dapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harold Lasswel dan Nilai Kualitas Demokrasi

Harold Lasswel (1958) menyatakan bahwa : politik adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana ? (Who gets, what, when and how ?) dia menyatakan bahwa di dalam kehidupan manusia terdapat 8 nilai dasar demokrasi utama yang selalu dipergunakan oleh masyarakat :

1. Kekuasaan (Power)
2. Peradaban/pencerahan (enlightenment)
3. Kesejahteraan (Wealth)
4. Kesehatan (Health)
5. Keterampilan/keahlian (skill)
6. Perhatian (afection)
7. Kebenaran, kepatuhan dan keadilan
8. Penghargaan (Respect)

Karl W.Deucht (1974) menambahkan dua nilai yaitu :

1. Keamanan
2. Kebebasan

Kesepuluh nilai yang dikemukakan oleh Lasswel dan Karl W. Deucht adalah nilai dasar yang diinginkan oleh setiap orang dalam suatu negara agar dipenuhi oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penulis hanya membahas tentang kekuasaan, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan serta kebebasan.

1. *Kekuasaan (power)*

Demokrasi berkaitan dengan bagaimana alokasi kekuasaan dibuat atau bagaimana kekuasaan terbagi dalam masyarakat. Sebagai nilai kunci dalam politik, bahwa kekuasaan dimaksudkan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan diri perilaku dan sebagai partisipasi dalam perumusan kebijakan.

Sistem politik demokrasi yakin bahwa seluruh warga negara semestinya mempunyai hak untuk menikmati kekuasaan dengan jalan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, misalnya : dalam proses perumusan kebijakan sebagai artikulasi kekuasaan, yang menjadi masalahnya adalah siapa saja dan siapakah warga negara yang secara nyata bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut ?

Untuk mengetahui seberapa jauh kelompok-kelompok masyarakat dapat mempengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan. Kita dapat mempelajari sistem politik Indonesia di masa orde baru dan pemilu tahun 1999 serta pemilu tahun 2019. Jika melihat perkembangannya, maka kekuasaan memberikan tempat

kepada berbagai kelompok masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang paling tepat. Masalahnya adalah : bagaimana agar lembaga tersebut dapat berfungsi dan berperan secara wajar di dalam upaya menyuarakan kepentingan masyarakat ? sebab dengan timbulnya berbagai kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengembangkan adanya ketidakpuasan atas peranan lembaga perwakilan tersebut. Tampaknya hingga saat ini hanya kepentingan aspirasi kepentingan kelompok kecil elite dan mereka yang memiliki akses terhadap penguasa saja yang diperhatikan sedangkan sebagian warga negara terlupakan.

2. *Kesejahteraan (Wealth)*

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diatasi dan merupakan tugas pokok pemerintah untuk mengadakan program-program yang nyata untuk masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan orang akan semakin lebih bisa bersikap sabar dan arif dalam berhubungan dengan orang lain. Di bidang politik peningkatan kesejahteraan akan menumbuhkan sikap aparat pemerintah dan masyarakat yang semakin matang dan mandiri. Masyarakat yang

sejahtera, yakni masyarakat yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

3. Kebenaran dan keadilan.

Nilai saling menghargai sangat berkaitan dengan nilai kebenaran dan nilai moral, nilai kebenaran ini dapat dilihat dalam suasana konflik dimana golongan yang lain merasa benar dan golongan yang lain dianggap salah. Dalam keadaan seperti ini akan terjadi konflik ideologi.

Nilai kebenaran jika dihubungkan dengan keadilan akan terasa sulit. Dimana keadilan diperlukan oleh semua orang untuk menumbuhkan rasa aman dan ternteram. Pemerintah yang adil adalah yang memperlakukan setiap orang secara sama tanpa

memandang asal usul kelompok dan penghasilannya. Pada dasarnya semua yang ingin diperlakukan adil tetapi kadang-kadang timbul situasi dimana orang merasa “rugi” jika berlaku adil dan hakim menjatuhkan hukuman yang tidak adil hanya karena ingin memperoleh imbalan materi atau takut kepada kekuasaan yang lebih besar. Dalam jangka panjang ketikadilan akan menimbulkan perasaan tidak puas dan tidak percaya terhadap pemerintah dan tentunya akan mempengaruhi instabilitas politik.

4. Kebebasan

Pada masa lampau kebebasan diartikan secara negative yaitu : tiada batasnya. Pada akhir abad ke 19 kebebasan telah diartikan secara positive dimana Karl W. Deutsch memberikan batasan yang positif sebagai berikut :

1. Adanya kesempatan yaitu tidak dilarangnya melakukan kegiatan jika ingin mendapat dan mengambil manfaat dari kebebasan yang tersedia.
2. Spontanitas atau keterusterangan yaitu tiadanya kendala untuk menyatakan pendapat secara terus terang tanpa melupakan aspek sopan santun.

Menurut Hegel kebebasan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kapasitas atau kemampuan untuk bertindak yaitu

kemampuan yang memiliki prasyarat dan motivasi.

2. Tersedianya pilihan yaitu : masyarakat boleh melakukan pilihan dan harus diberi alat agar mampu memilih dan dengan sendirinya kemakmuran serta kesempatan untuk memperoleh informasi dan pendidikan.

Untuk menumbuhkan “kekuasaan, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan serta kebebasan.” harus memberikan perhatian khusus pada faktor pendidikan dan sumber daya politik birokrasi pemerintah dalam hal pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat diarahkan untuk menciptakan tekanan perhatian pada keseimbangan antara proses pendidikan dan proses pengajaran Pertama: pembentukan Akhlak (carakter) yaitu Moral (Jujur,) dan Kinerja (Tanggung Ulet) Kedua: Kompetensi (Kritis, Kreatif, komunikatif dan kolaboratif) Ketiga: Literasi (keterbukaan wawasan) penguasaan ilmu.

KESIMPULAN

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu maupun kelompok (capacity), dan mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai serta kesejahteraan (equity). Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan

kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment), Membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability), Mengurangi ketergantungan negara yang satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence).

2. Politik mempunyai tujuan yaitu tercapainya kebutuhan dasar manusia yang dijabarkan dalam nilai-nilai kualitas demokrasi dan keinginan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi tersebut serta harus diupayakan oleh semua masyarakat Indonesia untuk tercapainya dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
3. kekuasaan, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan serta kebebasan adalah bentuk dari kualitas demokrasi suatu negara yang harus dipertahankan oleh lembaga-lembaga negara dalam suatu negara dan dilakukan sebagai pembangunan politik yang paling dasar dalam memprioritaskan kebutuhan dan tujuan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, (2012) *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama,)
- Davis E. After (1988) *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, P.T. Kincir Buana, Jakarta
- Etzioni, Amitai. (1985). *Organisasi – Organisasi Modern*, terj. Suryatim, Jakarta : UI – Press.
- Goldbreg, Alvin A. dan Carl E. Larson. (1985). *Komunikasi Kelompok : Proses – Proses Diskusi dan Penerapannya*, terj. Koesdarini Soemiati dan Gary R. Jusuf. Jakarta : UI – Press.
- Hasibuan, Melayu, S.P. (1987). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Haji Masagung.
- Herujito, Yayat M. (1996). *Dasar – Dasar Manajemen*. Bogor : Jurusan Sosek Faperta IPB.
- Harold Lasswel, (1958), *Politic : who, gets, what, when how ?* cleveland, world Publishing Co.
- H. Rosihan Anwar, (1980), *Mengenang Sjahrir*, P.T Gramedia, Jakarta.
- John Rawls, A Theory of Justice*, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, Copyright © 1971 by the President and Fellows of Harvard College. Reprinted by permission of the publishers.
- Kartono, Kartini. (1991). *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpin Abnormal itu ?*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Karl W. Deuct, (1970) *Politics and Goverment, how people Decide Their Fate*, Boston Houston Miffin Co.
- Martoyo, Susilo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Miriam Budiardjo (1986), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia, Jakarta
- Scott, William G., et al. 1992. *Struktur Organisasi dan Dinamikan*. Semarang : Dahana Prize.
- Siagian, Sondang P. (1997). *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Soekanto, Soejono. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Thoha, Miftah. (1991). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : CV. Rajawali

Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 2
Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
Submitted 1 Mei 2020, Reviewed 17 Mei 2020, Publish 31 Mei 2020

ISSN: 2442-3777 (cetak)
ISSN: 2622-691X (online)

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1990)
*Pengantar Administrasi
Pembangunan.* Jakarta :
LP3ES.

Yukl, Gary. (1998). *Kepemimpinan
Dalam Organisasi*, terj. Jusuf
Udaya. Jakarta : Prenhallindo.